

DAFTAR PUSTAKA

- Direktorat Jenderal Pajak. 2002. *Keputusan Direktorat Jenderal Pajak Nomor 382/PJ/2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah Bagi Pemungut Pajak Pertambahan Nilai dan Pengusaha Kena Pajak Rekanan*
- Direktorat Jenderal Pajak. 2015. *Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-29/PJ/2015 tentang Bentuk, Isi, dan Tata Cara Pengisian serta Penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT Masa PPN)*
- Direktorat Jenderal Pajak. 2019. *Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-02/PJ/2019 tentang Tata Cara Penyampaian, Penerimaan, dan Pengolahan Surat Pemberitahuan*
- Jatmiko, Agung. 2018. *Pengkreditan Faktur Pajak Masukan*. <https://www.online-pajak.com/faktur-pajak-masukan>. Diakses pada tanggal 30 April 2019
- Kementerian Keuangan. 2018. *Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 9/PMK.03/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 243/PMK.03/2014 tentang Surat Pemberitahuan (SPT)*
- Republik Indonesia. 1983. *Undang-Undang No.8 Tahun 1983 tentang PPN Barang dan Jasa & PPnBM stdd Undang-Undang No.42 Tahun 2009*
- Republik Indonesia. 1984. *Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai Tahun 1984*
- Republik Indonesia. 2007. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*
- Resmi, Siti. 2016. *Perpajakan: Teori dan Kasus Edisi 8 Buku 2*. Jakarta: Salemba Empat. 294 halaman

Suandy, Erly. 2014. *Hukum Pajak Edisi 6*. Jakarta: Salemba Empat. 253 halaman

Sukardji, Untung. 2015. *Pokok-Pokok Pajak Pertambahan Nilai Indonesia Edisi Revisi 2015*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Triwibowo. 2017. *Cara Pembetulan SPT Masa PPN e-Faktur*. <https://www.efaktur.espt.com/2017/03/cara-pembetulan-spt-masa-ppn-e-faktur.html>. Diakses pada tanggal 30 April 2019